

MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI

Aida Ratna Zulaiha
 Direktur Jejaring Pendidikan
 Komisi Pemberantasan Korupsi



AGENDA & PENGANTAR

01 PENGERTIAN KORUPSI

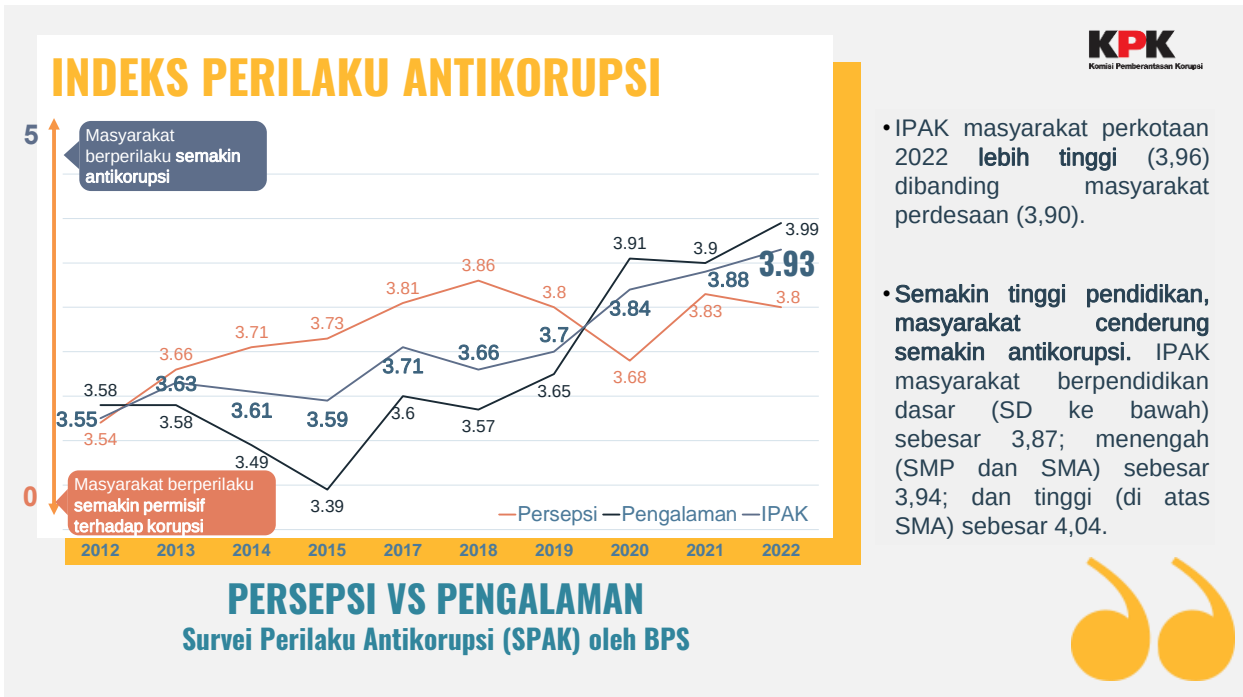
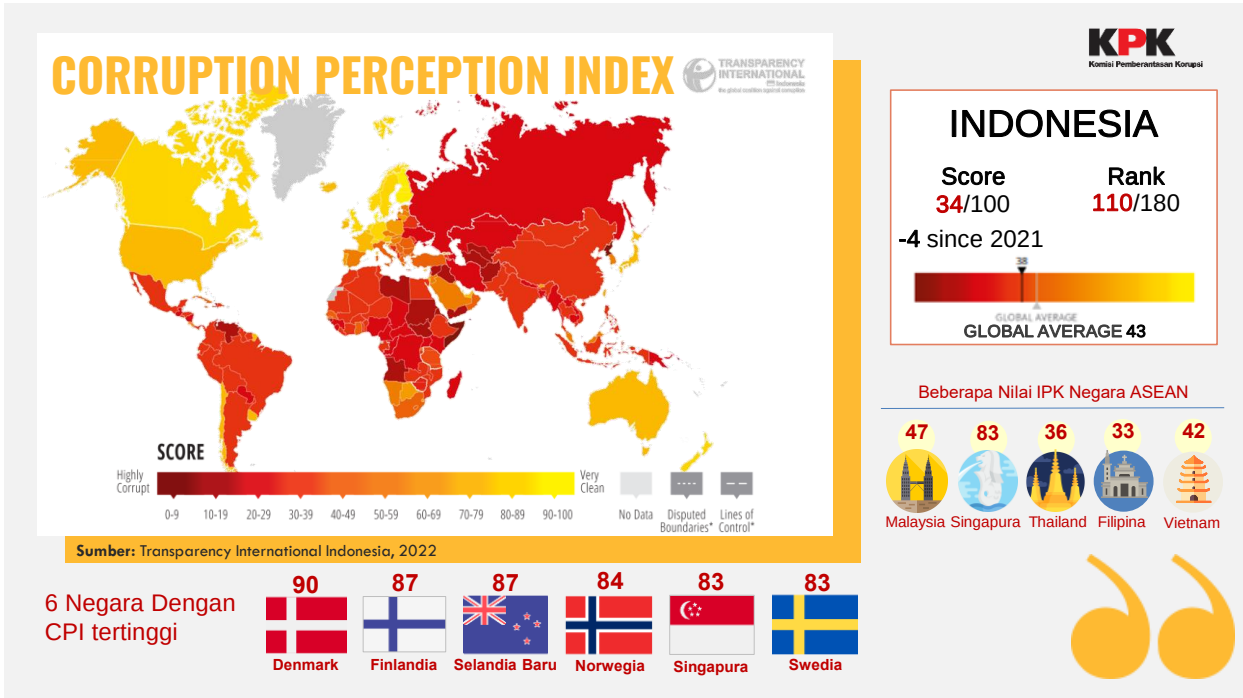
02 NILAI NILAI INTEGRITAS

03 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

04 DAMPAK MASIF KORUPSI

05 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

06 PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI



AGENDA

01 PENGERTIAN KORUPSI

02 NILAI NILAI INTEGRITAS

03 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

04 DAMPAK MASIF KORUPSI

05 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

06 PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI

FENOMENA GUNUNG ES KORUPSI

Petty Corruption

Grand and Political Corruption

Corruptive Behavior

Definisi Korupsi:

Berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus*. Asal kata *Corruptio* adalah *corrumpere*, kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah, turun ke Bahasa Indonesia yaitu *korupsi*. (Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi*)

Korupsi : kejahatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian (*The Lexicon Webster Dictionary, 1978*)

TINDAK PIDANA KORUPSI



KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Ps. 2, Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)



PENGGELAPAN DALAM JABATAN
Ps.8; Ps.9; Ps.10 a,b,c



PERBUATAN CURANG
Ps.7(1) a,b,c,d; Ps.7(2);
Ps.12 h



BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
Ps. 12i



SUAP-MENYUAP
Ps.5(1) a,b; Ps.13; Ps.5(2);
Ps.12 a,b; Ps.11; Ps.6(1)
a,b; Ps.6(2); Ps.12 c,d



PEMERASAN
Ps.12 e,f,g



GRATIFIKASI
Ps. 12 b jo Ps.12 c



TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI
1. Merintang pemeriksaan
2. Keterangan kekayaan
3. Keterangan rekening
4. Keterangan palsu
5. Identitas pelapor

SERUPA TAPI TAK SAMA



GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat tanam budi
- Tidak membutuhkan kesepakatan

Contoh:
Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

SUAP

- Ada kesepakatan
- Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup

Contoh:
Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek

PEMERASAN

- Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kuasa

Contoh:
Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut

PERILAKU KORUPTIF DI DUNIA PENDIDIKAN



PROPOSAL PALSU



GRATIFIKASI/ SUAP DOSEN/ATASAN



MARK UP UANG KULIAH/BUKU



PENYALAHGUNAAN DANA BEASISWA



TERLAMBAT



TITIP ABSEN/ BOLOS



MENCONTEK



PLAGIAT

PERILAKU KORUPTIF DI DUNIA PENDIDIKAN



medcom.id

Terindikasi Curang, 510 Peserta UTBK-SBMPTN Didiskualifikasi

Jakarta: Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTM) peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (Seleksi Bersama Negeri (UTBK-SBMPTN) 2020. Keperguruan peserta terindikasi melakukan kecurangan saat UTBK.

"Bahwa pada kesempatan ini ada beberapa peserta, disqualifikasi. Secara total ada 510 peserta yang di Pelaksana LTMPT, Mohammad Nash, dalam Konfer Pengumuman SBMPTN 2020, Jumat, 14 Agustus 2020

KOMPAS.com

4 Akademisi Tanah Air yang Terjerat Kasus Plagiarisme

Jakarta, CNN Indonesia - Selain Rektor Universitas Lampung (Unila) tiga orang dosen lain yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru tahun akademik 2022. tersangka kasus suap Unila.

Pontapen empat tersangka ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK N pada Minggu (25/8).

"Ditemukan bukti pemutaran yang cukup, maka KPK memindahkan ke ke tahap penyidikan dengan mengemukakan empat tersangka," ke dalam keterangan resmi yang diunggah CNNIndonesia.com.

CNN Indonesia

Daftar Tersangka Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru Unila

Jakarta, CNN Indonesia - Selain Rektor Unila, Karomah, KPK menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022. tersangka kasus suap Unila.

Pontapen empat tersangka ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK N pada Minggu (25/8).

"Ditemukan bukti pemutaran yang cukup, maka KPK memindahkan ke ke tahap penyidikan dengan mengemukakan empat tersangka," ke dalam keterangan resmi yang diunggah CNNIndonesia.com.

TRIBUNNEWS.COM

Rugikan Negara Rp 85 Miliar, KPK Tetapkan Mantan Rektor Unair Fasihul Lisan Sebagai Tersangka

Laporan Wartawan Tribunnews.com, eri komar sinaga

Prof. Dr. H. Fasihul Lisan, Apt

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Airlangga 2006-2010 Fasihul Lisan sebagai tersangka.

Fasihul menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan RS Kesehatan Universitas Airlangga DIPA 2007-2010 dan penyalahgunaan sarana dan prasarana Universitas Airlangga DIPA 2009.

AGENDA

01 PENGERTIAN KORUPSI

04 DAMPAK MASIF KORUPSI

02 NILAI NILAI INTEGRITAS

05 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

03 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

06 PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI

INTEGRITAS

(**A** + **K1** + **E**) - **K2**

- **AKUNTABILITAS** Dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataan
- **KOMPETENSI** Menguasai kemampuan sesuai bidangnya
- **ETIK** Memiliki dan menerapkan nilai moral serta Mendahulukan kepentingan umum
- **KORUPSI** Tidak melakukan korupsi dan melakukan langkah-langkah pengendalian

/in-teg-ri-tas/
 Keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan standar norma/hukum/nilai yang berlaku



AGENDA

01 PENGERTIAN KORUPSI

02 NILAI NILAI INTEGRITAS

03 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

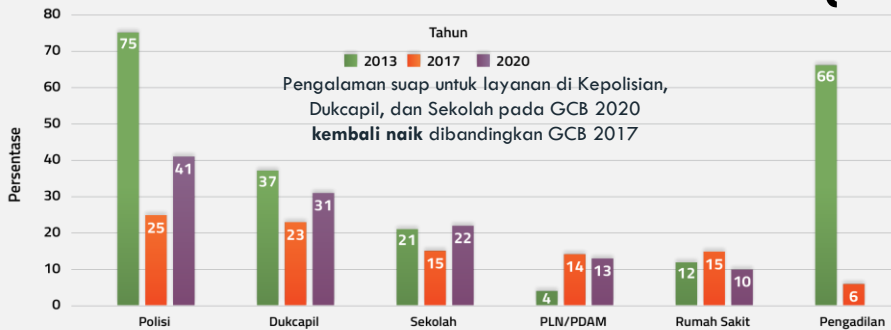
04 DAMPAK MASIF KORUPSI

05 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

06 PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER (GCB)

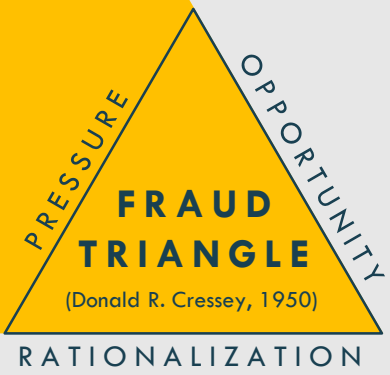


30%
Pengguna layanan publik membayar suap dalam 12 bulan sebelumnya

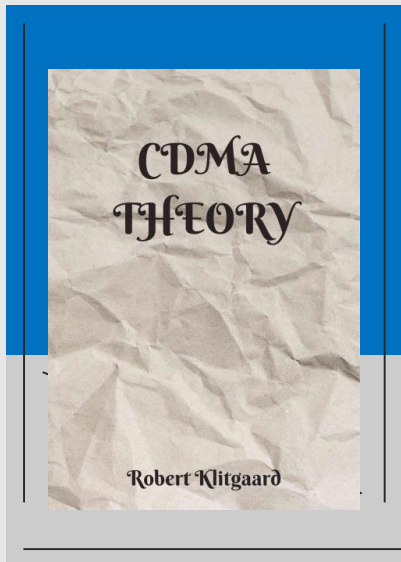
<p>Alasan memberikan uang atau pemberian lain</p> <p>Karena diminta: 25%</p>	<p>Ditawari agar layanan lebih cepat/lebih baik: 21%</p>	<p>Tidak diminta tapi diharapkan memberi: 17%</p>	<p>Tidak diminta, sebagai 'ucapan' terima kasih: 33%</p>
--	---	--	---

25% supply-side, 71% demand side, atau setidaknya ada pada kontrol pemberi

Sumber: Transparency International Indonesia, 2020



Pressure	Opportunity	Rationalization	Capability
Tekanan dari internal (personal & perusahaan) maupun eksternal	Kesempatan (sistem yang lemah)	Rasionalisasi, pembenaran atas perbuatan yang dilakukan	Kemampuan (jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, pengetahuan atas sistem)



CDMA THEORY

Menurut Robert Klitgaard

$$C = D + M - A$$

Corruption =

Discretionary + Monopoly - Accountability

Korupsi dapat terjadi jika ada **monopoli kekuasaan** yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau **wewenang** yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

AGENDA

01 PENGERTIAN KORUPSI

02 NILAI NILAI INTEGRITAS

03 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

04 DAMPAK MASIF KORUPSI

05 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

06 PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI

DAMPAK KORUPSI

United Nation Convention
Against Corruption (UNCAC)

/

Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



Merusak proses
demokrasi



Meruntuhkan
hukum



menurunkan
kualitas hidup atau
pembangunan
berkelanjutan



Merusak pasar,
harga, dan
persaingan usaha
yang sehat



Pelanggaran hak
asasi manusia



Menyebabkan
kejahatan lain
berkembang

DAMPAK KORUPSI

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



KEMISKINAN



**KERUSAKAN
ALAM**



**BIAYA EKONOMI
TINGGI**

BIAYA SOSIAL KORUPSI

N o.	Sektor kasus	Biaya Sosial Korupsi	Hukuman Finansial Inkracht	Perbandingan (persen)	Perbandingan (kali lipat)
1	Kehutanan	923,228,942,461	1,700,000,000	0.18%	543.1
2	Kesehatan	75,573,203,394	19,259,769,893	25.48%	3.9
3	Perdagangan	218,255,536,924	4,554,932,430	2.09%	47.9
4	Transportasi	9,682,778,329	2,574,717,264	26.59%	3.8

*Perbandingan Biaya Sosial dan Hukuman Finansial Inkracht, Peluang Penerapan

- Dengan metode penghitungan Biaya Sosial Korupsi terjadi peningkatan sebesar 4 kali lipat bahkan hingga 543 kali lipat dari tuntutan konvensional.
- Implementasi untuk pembebanan Biaya Sosial Korupsi ini dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan ganti kerugian sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 98 KUHP. Penerapan butuh regulasi yang mendukung; misalnya Perma registrasi perkara, panduan menghitung biaya sosial, panduan menuntut kasus korupsi menggunakan biaya sosial. Selain itu juga membutuhkan pemahaman yang baik dari para penegak hukum dan komitmen yang kuat (political will) dari stakeholder kunci.

BIAYA SOSIAL KORUPSI



Biaya Akibat Korupsi (Eksplisit)

Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)

Biaya Antisipasi Korupsi

- Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten
- Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi
- Berbagai kegiatan lain dalam rangka pencegahan korupsi oleh KPK

Biaya Reaksi Terhadap Korupsi

- Biaya proses penanganan perkara: pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan
- Biaya peradilan (panitera, jaksa, hakim, dll)
- Biaya proses rampasan aset di luar dan di dalam negeri
- Biaya rutan dan lapas, biaya pengumpulan denda, dll.

Biaya Akibat Korupsi (Implisit)

- Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu
- Perbedaan multiplier ekonomi kondisi tanpa korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi

AGENDA

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 01 PENGERTIAN KORUPSI | 04 DAMPAK MASIF KORUPSI |
| 02 NILAI NILAI INTEGRITAS | 05 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI |
| 03 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI | 06 PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI |

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI



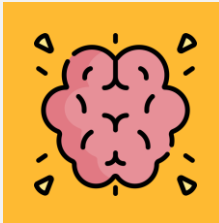
PENCEGAHAN X PENDIDIKAN



AGENDA

- 01 PENGERTIAN KORUPSI
- 02 NILAI NILAI INTEGRITAS
- 03 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
- 04 DAMPAK MASIF KORUPSI
- 05 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
- 06 PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI

PERAN PERGURUAN TINGGI



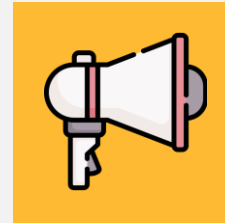
EDUKASI

Menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi sebagai MK Mandiri atau terintegrasi di MK Relevan



EKOSISTEM

Pembangunan Integritas Ekosistem Pendidikan yang mendukung habituasi, keteladanan dan pengalaman integritas



AKSI INTEGRITAS

Peran aktif dalam gerakan antikorupsi melalui Tridharma Perguruan Tinggi (Pengawasan, Kajian, advokasi, Penyuluhan, Kampanye, dll)

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

PENGABDIAN MASYARAKAT

KKN Tematik Anti Korupsi / layanan publik

PENDIDIKAN

- Pusat Pengajaran Antikorupsi (Insersi Pendidikan Antikorupsi, Pelatihan, Kaderisasi)
- *Pool Of Expert*
- Materi kreatif Antikorupsi untuk masyarakat



**PUSAT GERAKAN AKADEMIS
PEMBERANTASAN KORUPSI**


PENELITIAN

- Skripsi Anti Korupsi Riset/Kajian
- Pembentukan pusat kajian Anti Korupsi
- Perbaikan sistem / tata kelola kampus
- Pusat Inovasi Antikorupsi (Karya Tulis, Artikel, Riset, FGD)


ANTI CORRUPTION LEARNING CENTER




← → ↻ <https://adclcpk.go.id>


 **Pusat Edukasi Antikorupsi**
Cipta • Karya • Berdaya


Tentang Kami Program Pustaka Aksi & Informasi Kuis Jadwal

 **Pusat Edukasi Antikorupsi**
Cipta • Karya • Berdaya

Portal pembelajaran antikorupsi ini disediakan bagi berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Kami menyediakan berbagai materi edukasi antikorupsi dan integritas dalam berbagai bentuk, seperti buku, artikel, boardgame, lagu, maupun video, yang bisa diakses dengan mudah.


 **Alamat Kantor ACLC KPK**
Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920 DKI Jakarta, Indonesia

 **Email ACLC KPK**
aclc@kpk.go.id




E-Learning

Pelajari materi e-learning mulai dari dasar ilmu antikorupsi



Sertifikasi

Ikuti sertifikasi khusus di bidang antikorupsi



Interaksi

Ikuti kuis rutin dari kami dan berkontribusi di dalam ACLC KPK



PAK
Pendidikan Anti Korupsi



**TERIMA
KASIH**

-  198
-  www.kpk.go.id
-  aclc.kpk.go.id
-  informasi@kpk.go.id